

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Dinas Kominfo Kota Bengkulu dalam Pelaksanaannya pada Dinas Kominfo Kota Bengkulu belum berlangsung secara optimal. Meskipun terdapat upaya-upaya seperti sosialisai terkait perlindungan data pribadi, peningkatan keamanan sistem dasar, dan pembinaan terhadap perangkat daerah, namun implementasinya masih terbatas. Kelemahan terlihat dari belum tersedianya SOP perlindungan data yang komprehensif, belum adanya unit atau pejabat khusus yang bertanggung jawab sebagai pengendali data pribadi (*Data Protection Officer*), minimnya audit keamanan, serta kurangnya sumber daya manusia dan anggaran teknologi informasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya memenuhi standar pengendalian dan pengawasan yang ditetapkan Undang - Undang.

2. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perspektif Siyasah terhadap implementasi Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif siyasah, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari *tadbir al-umur* (pengelolaan urusan publik) yang harus dilaksanakan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah al- 'ammah*). Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip - prinsip siyasah dalam implementasi Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya terwujud. Keterbatasan tata kelola, lemahnya mekanisme perlindungan, dan belum tersedianya sistem pengawasan yang terstruktur menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan, keamanan, perlindungan hak masyarakat belum berjalan optimal. Oleh karena itu, perlu penguatan kelembagaan dan kebijakan agar Dinas Kominfo mampu menjalankan peran siyasah secara lebih efektif dalam menjaga hak-hak data pribadi masyarakat.

Saran

1. Pembentukan unit khusus atau penunjukan Pejabat Pengendali Data Pribadi (DPO) menjadi langkah penting untuk memperkuat tanggung jawab kelembagaan dan memastikan pelaksanaan UU PDP berjalan terarah.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan siber, manajemen risiko, dan tata kelola data perlu diprioritaskan agar petugas memiliki kompetensi memadai dalam melaksanakan fungsi pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali bin Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), h. 4; Muhammad Iqbal, fiqh siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Al-Mawardi Imam, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam,(Jakarta: DARUL FALAH,2006)
- Buku laporan Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bengkulu. H. 4-6
- Debora Aswinda Solin, Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Adversiting (L.B.A) di Indonesia, 2018
- Dharma setyawan Salam. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya. Djakarta, Djembatan.
- Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta: grasindo. 2007
- Haris Syamsudin. Desentralisasi & Otonomi Daerah, Jakarta. LIPI, 2007
- Iqbal Muhammad, Fiqh Siyasah,Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,JAKARTA: KENCANA,2014,
- Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009)
- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. Alumni Bandung, 2004, hlm. 117.
- Kusumastuti Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, "*Metode Penelitian Kualitatif*" Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019

Makhya, "Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Konstitusi," dalam *Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Shinta Dewi, *Perlindungan Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 53.

Syarif Ibnu, Mujur Dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, :Erlangga, 2008

Wahhab Khallaf Abdul, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977

JURNAL

Jerry Kang. Information Privacy in Cyberspace Transaction, *Stanford Law Review* Vol. 50 Issue 4, Standford, 5. 1998.

Moh. Hamzah Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum*, Vol. 37, No. 2 (2021), h. 119.

Muhammad Yudistira Ramadani, "Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 oleh Kominfo," *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2023), h. 67.

Naylawati Bahtiar, "Darurat Kebocoran Data:Kebuntuan Regulasi Pemerintah", *jurnal DPMR*. Vol.2 Issue 1. (June 2022). h. 86

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88-100

SKRIPSI

Agustina Putri Eka. "tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan data pribadi perspektifsiyasah

dusturiyah. (fakultas syariah universitas islam negeri fatmawati sukarno bengkulu,bengkulu.2023), h.1.

Rahmawati Siti, *Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah* (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2019), h. 61.

Sirait, Eben, "Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/ 2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". Other thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2020.

ARTIKEL

Baca makalah Jimly Asshiddiqie, Otonomi, op.cit Bengkulu Today. (2023). *Statistik Migrasi Kota Bengkulu*. <https://www.bengkulutoday.com/index.php/statistik-migrasi-kota-bengkulu> diakses pada 14 juli 2025

Databoks. (2024). *Jumlah Penduduk Kota Bengkulu 394,19 Ribu Jiwa per 2024*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/800493ce026c3fd/jumlah-penduduk-kota-bengkulu-394-19-ribu-jiwa-data-per-2024> diakses pada 14 juli 2025

Farah Nabilla, Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia, Sebulan Tiga Kali Kejadian, <https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasuskebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali-kejadian>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 15.45 wib

Harian Bengkulu Ekspres. "Kominfo Usulkan Rp 6 Miliar Pelatihan SDM, Ini yang Disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu." *Harian Bengkulu Ekspres*, diakses 18 Juli 2025,

<https://kominfo.bengkulukota.go.id/tupoksi/>. Diakses 27 juli 2025

<https://www.wartaprima.com/bonus-demografi-kota-bengkulu> diakses pada 14 juli 2025

Jejak Keadilan. (2023). *Bonus Demografi Kota Bengkulu*.
<https://jejakkeadilan.com/2023/08/29/bonus-demografi-kota-bengkulu/> diakses pada 14 juli 2025

KBBI, "Pengertian Kata Privasi". <https://kbbi.web.id/privasi> diakses pada 20 Maret 2023.

KBBI. "Pengertian Data". <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada 24 Oktober 2022

Pemerintah kota bengkulu
<https://profil.bengkulukota.go.id/geografis/> diakses pada 14 juli 2024

Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu* (Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu, 2021),
<https://jdih.bengkulukota.go.id/>. diakses 18 Juli 2025,

Prayogi Dwi Sulistyio UU Pdp Segera Berlaku, *Perpres Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Juga Terbit 12 oktober 2024*
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/12/pemerintah-belum-selesai-siapkan-lembaga-perlindungan-data-pribadi>

Reddit Indonesia. (2024). *Diskusi Agama di Bengkulu*.
<https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/1a11kt1>

Sumatranomics. (2024). *Proyeksi Struktur Usia dan Tantangan Kebijakan*.
<https://sumatranomics.com/artikel-blog/tantangan-demografi-bengkulu-2045> diakses pada 14 juli 2025

sumatranomics. (2024). *Tantangan Demografi Bengkulu 2045*.
<https://sumatranomics.com/artikel-blog/tantangan-demografi-bengkulu-2045/> diakses pada 14 juli 2025

Tempo.co, "Ini Alasan Kominfo Diganti Nama Jadi Komdigi,"
<https://www.tempo.co/digital/ini-alasan-kominfo-diganti-nama-jadi-komdigi-1096674>.diakses . diakses 18 Juli 2025,

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
"The Privacy Principles", <http://oecdprivacy.org/> diakses pada 24 November 2022

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria saat ditemui awak media di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (14/10/2024). Foto: RRI/Josua Sihombing

Warta Prima. *Potret Bonus Demografi dan Ketenagakerjaan Bengkulu.* (2023).

Wikipedia Indonesia. (2024). *Suku Bangsa di Provinsi Bengkulu.* <https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu> diakses pada 14 juli 2025

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1), dalam *Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: MPR RI, 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.*

Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 58.

